

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyediaan layanan penerangan jalan umum dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks sementara kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, sehingga perlu adanya perubahan skema;

b. bahwa dengan adanya perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah, sehingga perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

c. bahwa Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundang-undangan sehingga

- terpenuhi kepastian hukum dalam penyediaan layanan penangan jalan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM

PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN . . . NOMOR....
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(..../.....)

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
 PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kemudahan pengguna jalan. Penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah masih belum optimal melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dikarenakan memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks sementara kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, sehingga diperlukan skema lain yaitu melalui pinjaman daerah.

Dengan adanya perubahan skema dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha menjadi pinjaman maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR . . .